Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 6, No. 1,31 Agustus 2026, pp. 83-112
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v6i1.940

Formulasi Kebijakan Sekolah Maung (Manusia Unggul): Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pendidikan di Jawa Barat

Sindy Oktaviani[1], Zandini Azhara[2], Bagoes Rifki S[3], Ghaly Winata G[4], Ditya Dirja[5], Ramaditya Rahardian[6]
[1,2,3,4,5,6] Universitas Muhammadiyah Bandung
Email: Sindyoktavian23@gmail.com, zandinniaz@gmail.com, bagusrifki.s123@gmail.com, ghaly.winata0709@gmail.com, dityadirja29@gmail.com, ramaditya.rahardian@umbandung.ac.id

Abstrak

Program Sekolah Maung (Manusia Unggul) merupakan inovasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan melalui penyelenggaraan sekolah unggulan berbasis pengembangan potensi akademik, nonakademik, karakter, dan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses formulasi kebijakan Program Sekolah Maung sebagai strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan pendidikan daerah menggunakan pendekatan Multiple Streams Framework (MSF) dari Kingdon. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi literatur, dengan informan penelitian terdiri atas pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, siswa yang diterima dan tidak diterima dalam program, serta orang tua siswa. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengacu pada model Miles dan Huberman, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan Sekolah Maung terbentuk melalui pertemuan problem stream, policy stream, dan political stream yang membuka policy window, dengan dukungan policy entrepreneur dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan kurikulum, kualitas guru, pembelajaran berbasis teknologi, dan pendidikan karakter, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa potensi kesenjangan antara sekolah unggulan dan sekolah reguler, transparansi seleksi, serta pemerataan akses pendidikan.

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, *Multiple Streams Framework*, Sekolah Maung, Pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Abstract

The Maung School (Superior Human) Program is a policy innovation of the West Java Provincial Government aimed at improving the quality of education through the establishment of superior schools based on the development of academic and non-academic potential, character, and local wisdom. This study analyzes the policy formulation process of the Maung School Program as a regional government strategy for education development in West Java Province, using the Multiple Streams Framework (MSF) proposed by Kingdon. A qualitative descriptive method was applied, with data obtained through in-depth interviews, observation, documentation, and literature review. Research informants consisted of officials of the West Java Provincial Education Office, students who were accepted and rejected in the Maung School Program, and their parents. Data were analyzed following the interactive model of Miles and Huberman, comprising data collection, condensation, display, and conclusion drawing, and validated through source triangulation. The results show that the policy was formed through the intersection of problem, policy, and political streams that opened a policy window, supported by policy entrepreneurs from the provincial government. The program has the potential to improve education quality through curriculum strengthening, teacher development, technology-based learning, and character

Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 6, No. 1,31 Agustus 2026, pp. 83-112
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v6i1.940

education, while also facing challenges related to equity of access, transparency of selection, and the widening gap between superior and regular schools.

Keywords: *Policy Formulation, Multiple Streams Framework, Maung School, Education, West Java Provincial Government.*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Kesadaran untuk mengutamakan pendidikan sebagai kebutuhan yang wajib dipenuhi menjadi prasyarat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu negara (Halean et al., 2021). Pendidikan tidak hanya mengembangkan wawasan dan potensi individu, tetapi juga membentuk sikap, etika kerja, dan nilai yang menjadi fondasi interaksi sosial, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab (Pasaribu et al., 2026).

Secara nasional, kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, tercermin dari rendahnya capaian literasi dan numerasi peserta didik serta kesenjangan kualitas sarana dan prasarana antarwilayah, yang menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi mutu pendidikan (Yangambi, 2023). Berdasarkan data Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2022 oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Indonesia berada pada peringkat 69 dari 80 negara peserta penilaian yang mengukur skor literasi, numerasi, dan sains. Adapun berikut ini disajikan Tabel 1 mengenai peringkat sejumlah negara dalam skor matematika, sains, dan literasi pada Programme for International Student Assessment 2022.

Tabel 1. Programme for International Student Assessment (PISA) 2022

Peringkat Negara	Skor Matematika	Skor Sains	Skor Literasi	Total Skor
1. Singapura	575	561	543	1.679
2. China	552	543	510	1.605
3. Taiwan	547	537	515	1.599
4. Jepang	536	547	516	1.599
5. Korea	527	528	515	1.570
69. Indonesia	366	383	359	1.108
79. Dominika (Rep)	339	360	351	1.050
80. Kamboja	336	347	329	1.012

Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 6, No. 1,31 Agustus 2026, pp. 83-112
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v6i1.940

Sumber: OECD (2022) dalam Prasastisiwi (2024)

Sementara itu di Jawa Barat, skor literasi tahun 2025 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mencapai 18,07, sedangkan skor numerasi tahun 2025 dalam rapor pendidikan yang dipegang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat baru mencapai 66,81 dari target 70,6. Kondisi ini diperparah oleh fenomena kurikulum yang sangat terstandar dan sarat beban sehingga kurang mengeksplorasi kreativitas dan potensi peserta didik (Falah & Hadna, 2022, dalam Komarudin & Shofiyyah, 2023).

Dalam menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi berbagai inovasi kebijakan pendidikan, salah satunya melalui pengembangan sekolah unggulan yang dikenal dengan program "Sekolah Maung (Manusia Unggul)". Program ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah untuk menciptakan sekolah berstandar tinggi yang mampu menghasilkan lulusan unggul secara akademik maupun karakter, dengan konsep yang lebih luas dibandingkan sekolah unggulan konvensional karena turut mempertimbangkan minat dan bakat siswa serta tetap berakar pada budaya Sunda, diawali dengan pembenahan sistem penerimaan siswa, penguatan sumber daya manusia guru, kurikulum, dan sarana-prasarana (Pun, 2026). Adapun berikut ini disajikan Tabel 2 mengenai daftar sekolah penyelenggara Program Sekolah Maung (Manusia Unggul) di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2. Daftar Sekolah Maung (Manusia Unggul) di Jawa Barat

Tingkat SMA	Tingkat SMK
SMAN 2 Cibinong	SMKN 1 Cibinong
SMAN 1 Bogor	SMKN 3 Bogor
SMAN 1 Depok	SMKN 2 Kota Bekasi
SMAN 1 Bekasi	SMKN 1 Cibadak
SMAN 2 Tambun Selatan	SMKN 1 Pacet
SMAN 1 Subang	SMKN 1 Cimahi

Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 6, No. 1,31 Agustus 2026, pp. 83-112
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v6i1.940

SMAN 1 Purwakarta	SMKN 1 Katapang
SMAN 5 Karawang	SMKN 1 Majalengka
SMAN 2 Kota Sukabumi	SMKN 1 Mundu
SMAN 1 Pelabuhanratu	SMKN 1 Garut
SMAN 1 Cisarua	SMKN 2 Tasikmalaya
SMAN 1 Cianjur	SMKN 1 Pangandaran
SMAN 3 Bandung	SMKN 1 Tajug Gede Purwakarta*
SMAN 5 Bandung	
SMAN 3 Cimahi	
SMAN 1 Soreang	
SMAN 1 Sumedang	
SMAN 1 Majalengka	
SMAN 1 Sindang	
SMAN 2 Cirebon	
SMAN 1 Palimanan	
SMAN 2 Kuningan	
SMAN 1 Garut	
SMAN 1 Tasikmalaya	
SMAN 1 Singaparna	
SMAN 1 Ciamis	
SMAN 1 Banjar	
SMAN 1 Parigi	

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2026

Program Sekolah Maung juga tidak terlepas dari berbagai dinamika kebijakan di lapangan. Di satu sisi, program ini dinilai mampu meningkatkan kualitas pendidikan

secara signifikan melalui penciptaan lingkungan belajar yang lebih kompetitif dan terarah. Di sisi lain, kehadiran sekolah unggulan seperti Sekolah Maung berpotensi menciptakan kesenjangan antara sekolah unggulan dan sekolah reguler (Asriyanti et al., 2025), mengingat sekolah unggulan cenderung memperoleh perhatian lebih besar dari segi fasilitas, tenaga pendidik, maupun dukungan kebijakan dibandingkan sekolah reguler.

Program Sekolah Maung pada dasarnya tidak hanya merepresentasikan inovasi pendidikan daerah, tetapi juga menunjukkan proses formulasi kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, serta pertimbangan strategis pemerintah daerah. Tahap formulasi kebijakan menjadi penting karena menentukan arah implementasi program, distribusi sumber daya pendidikan, serta keberlanjutan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sekolah unggulan tidak cukup dipahami sebagai sekolah dengan prestasi akademik tinggi semata, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan yang dirancang melalui kebijakan, kepemimpinan, penguatan sumber daya manusia, inovasi kurikulum, budaya mutu, dan dukungan sarana prasarana yang memadai. Aisyahrani (2024) menegaskan bahwa sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai karakter kepada peserta didik melalui proses pendidikan berkelanjutan yang melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat, temuan yang relevan dengan Program Sekolah Maung karena konsep manusia unggul tidak hanya berkaitan dengan capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan tanggung jawab sosial peserta didik. Maudinah & Musgamy (2026) menunjukkan bahwa sekolah unggulan merupakan kebijakan strategis yang diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui lingkungan belajar yang kondusif, tenaga pendidik yang kompeten, dan kurikulum yang diperkaya, namun berpotensi menimbulkan ketimpangan akses dan diskriminasi input siswa apabila tidak dirancang secara inklusif, sehingga formulasi kebijakan Sekolah Maung perlu mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan mutu dan keadilan akses pendidikan. Waal et al. (2025) menunjukkan bahwa pembangunan high performing schools dapat dilakukan melalui kerangka *high performance organization* yang menekankan evaluasi organisasi, penguatan manajemen internal, dan kualitas kepemimpinan, sehingga sekolah dapat bergerak menuju kinerja tinggi apabila memiliki

visi yang jelas dan sistem penjaminan mutu. Komarudin & Shofiyyah (2023) menegaskan bahwa model pengembangan sekolah unggul tidak hanya ditentukan oleh seleksi input siswa atau kelengkapan fasilitas, tetapi juga oleh iklim sekolah, budaya belajar, kepemimpinan kepala sekolah, dan kompetensi guru. Adapun Belina et al. (2026) menekankan bahwa peningkatan kualitas sekolah menengah memerlukan strategi multi-level yang mencakup input pendidikan, proses di tingkat sekolah, dan praktik pembelajaran di kelas.

Sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan sekolah unggulan sebagai objek implementasi kebijakan, bukan sebagai hasil dari proses formulasi kebijakan publik. Kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana kebijakan sekolah unggulan dirumuskan pada level pemerintah daerah, terutama pada program inovasi pendidikan baru seperti Sekolah Maung di Provinsi Jawa Barat, masih terbatas, dan belum banyak penelitian yang mengkaji dinamika interaksi antara masalah pendidikan, alternatif kebijakan, dan faktor politik dalam proses lahirnya kebijakan pendidikan daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis formulasi kebijakan pendidikan daerah melalui studi kasus Program Sekolah Maung (Manusia Unggul) di Provinsi Jawa Barat sebagai inovasi kebijakan pendidikan terbaru pemerintah daerah, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada tahap implementasi sekolah unggulan.

Dalam kajian kebijakan publik, proses tersebut dapat dianalisis menggunakan pendekatan *Multiple Streams Framework* yang dikemukakan oleh Kingdon (2014). Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan lahir melalui pertemuan tiga arus utama, yaitu *problem stream* (arus masalah), *policy stream* (arus kebijakan), dan *political stream* (arus politik), yang membuka peluang terbentuknya kebijakan melalui *policy window*, dengan kehadiran *policy entrepreneur* sebagai aktor penggerak. Pendekatan ini relevan untuk memahami bagaimana Program Sekolah Maung muncul sebagai respons pemerintah daerah terhadap persoalan mutu pendidikan sekaligus sebagai agenda strategis pembangunan pendidikan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana proses formulasi kebijakan Program Sekolah Maung (Manusia Unggul) sebagai strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan pendidikan di daerah, dengan tujuan penelitian untuk menganalisis formulasi kebijakan Sekolah Maung (Manusia Unggul) sebagai strategi Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan pendidikan daerah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada formulasi kebijakan Program Sekolah Maung di Provinsi Jawa Barat. Menurut Creswell (2016), pendekatan kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan oleh sekelompok individu atau perorangan. Melalui desain deskriptif ini, peneliti bertujuan memberikan gambaran mendalam, utuh, dan sistematis mengenai proses perumusan kebijakan tersebut. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, serta analisis deskriptif yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara mendalam bersama sejumlah informan kunci *(key informants)* yang dipilih secara purposif guna memperoleh gambaran utuh mengenai dinamika kebijakan ini. Informan penelitian terdiri atas tiga kelompok kepentingan, yaitu unsur regulator/pembuat kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, unsur siswa yang diterima maupun tidak diterima dalam Program Sekolah Maung, serta unsur orang tua dari masing-masing kelompok siswa tersebut. Pemilihan informan dari ketiga kelompok ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang berimbang antara perspektif pembuat kebijakan dan perspektif kelompok sasaran kebijakan. Adapun berikut ini disajikan Tabel 3 mengenai daftar informan penelitian.

Tabel 3. Informan Penelitian

Kode	Informan	Posisi/Keterangan	Kategori
I-1	Dr. Ai Nurhasan, AP., M.Si.	Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	Unsur regulator/pembuat kebijakan
I-2	Insan Marwati, S.Pd.	Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Hubungan Masyarakat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	Unsur regulator/pembuat kebijakan
I-3	Siswa penerima manfaat	Peserta didik yang diterima melalui Jalur Kompetensi Nonakademik dan kini terdaftar di SMA Negeri 3 Bandung	Unsur siswa (kelompok diterima)

Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 6, No. 1,31 Agustus 2026, pp. 83-112
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v6i1.940

I-4	Rahma	Orang tua siswa yang diterima dalam Program Sekolah Maung	Unsur orang tua (kelompok diterima)
I-5	Siswa terdampak kebijakan	Peserta didik yang tidak diterima di sekolah pilihan pertama dan kini terdaftar di SMA Negeri 1 Katapang melalui jalur reguler	Unsur siswa (kelompok tidak diterima)
I-6	Halimah Tsadiah	Orang tua siswa yang tidak diterima dalam Program Sekolah Maung	Unsur orang tua (kelompok tidak diterima)

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Selain mengandalkan data primer dari keenam informan kunci tersebut, peneliti juga mengumpulkan data sekunder untuk melengkapi materi penelitian, yang diperoleh melalui studi dokumentasi atas dokumen resmi pemerintah, jurnal ilmiah, buku teks, literatur terkait, serta publikasi resmi dari laman dinas terkait. Untuk menjamin keabsahan dan kevalidan seluruh data yang telah dihimpun, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari sudut pandang yang berbeda, mulai dari jajaran birokrasi hingga kelompok masyarakat terdampak.

Setelah data dinyatakan valid, proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan mengacu pada tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman (2014). Proses ini diawali dengan tahap pengumpulan data *(data collection)* untuk menghimpun seluruh hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Langkah berikutnya adalah reduksi data *(data condensation),* di mana peneliti memilih, menyederhanakan, merangkum, dan memfokuskan data mentah ke dalam pola atau tema yang relevan dengan formulasi kebijakan Program Sekolah Maung. Data yang telah direduksi kemudian masuk ke tahap penyajian data *(data display)* dengan menyusun informasi secara terstruktur ke dalam bentuk teks naratif agar mudah dipahami dan dianalisis. Proses ini diakhiri dengan penarikan serta pengujian kesimpulan *(conclusion drawing and verification)* untuk merumuskan jawaban akhir yang kredibel dan objektif atas permasalahan yang diteliti.

Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 6, No. 1,31 Agustus 2026, pp. 83-112
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v6i1.940

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Program Sekolah Maung (Manusia Unggul)

Program Sekolah Maung (Manusia Unggul) merupakan inovasi kebijakan pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang secara resmi diadopsi ke dalam agenda prioritas RPJMD melalui visi "Jabar Istimewa" (Pendidikan Istimewa). Kebijakan ini lahir sebagai jawaban atas kegelisahan bahwa anak-anak yang memiliki kecerdasan dan prestasi di atas rata-rata selama ini kurang terfasilitasi, karena di kelas reguler potensi mereka cenderung tidak tergali optimal akibat penyamarataan dengan kemampuan rata-rata. Sekolah Maung hadir untuk memberikan ruang khusus bagi peserta didik berkemampuan tinggi agar potensinya dapat dipacu secara maksimal, tanpa mengabaikan penanganan bagi anak-anak di jalur reguler maupun Sekolah Luar Biasa (SLB).

Untuk melahirkan manusia unggul secara utuh, Sekolah Maung menerapkan kombinasi tiga pilar kurikulum, yaitu Kurikulum Nasional sebagai pemenuhan standar wajib dari pemerintah pusat, Kurikulum Pengayaan Internasional yang mengadopsi standar global seperti Cambridge, dan Kurikulum Kearifan Lokal (Gapura Pancawaluya) yang mengajarkan etika, bahasa, budaya, dan hubungan harmonis manusia dengan ekosistem lingkungannya, sehingga siswa dipersiapkan untuk berkiprah di kancah dunia namun tetap memegang teguh akar budaya lokalnya.

Guna mendukung ekosistem belajar yang kuat, struktur organisasi sekolah ini tidak hanya mengandalkan manajemen formal, tetapi juga didampingi oleh Dewan Pakar dari kalangan perguruan tinggi untuk mengawal kualitas akademik, serta Dewan Penyantun dari alumni, masyarakat, dan industri yang menyokong kebutuhan sekolah. Demi efisiensi anggaran, pemerintah tidak membangun infrastruktur baru dari nol, melainkan menetapkan 40 sekolah penyelenggara yang terdiri dari 28 SMA Negeri dan 12 SMK Negeri di Jawa Barat, yang dipilih secara selektif berdasarkan indikator akreditasi, kesiapan fasilitas, budaya sekolah yang sehat, serta potensi guru yang siap dikembangkan. Proses formulasi kebijakan ini dapat dieksekusi dalam waktu relatif cepat, yakni kurang dari satu tahun, karena pemerintah mengadopsi best practice dari

sekolah-sekolah unggul yang sudah sukses sebelumnya, seperti SMA Taruna Nusantara dan MAN Insan Cendekia.

Pemerintah juga menyadari tantangan terkait keadilan akses bagi masyarakat sekitar, mengingat seleksi Sekolah Maung murni berbasis prestasi dan tidak menerapkan jalur zonasi (domisili) maupun afirmasi, sehingga warga terdekat yang tidak memenuhi syarat prestasi berpotensi kehilangan kesempatan bersekolah di sana. Sebagai solusinya, pemerintah menunjuk dan merekrut sekolah swasta di sekitar lokasi sebagai pendamping untuk menampung warga setempat. Ke depannya, Program Sekolah Maung dirancang untuk tidak menjadi sekolah eksklusif selamanya, karena selain ditargetkan mencetak lulusan yang menjadi pionir pembangunan nasional dan Jawa Barat, sekolah-sekolah ini juga diwajibkan memberikan efek pengimbasan (multiplier effect) kepada sekolah-sekolah reguler di sekitarnya, sehingga kualitas pendidikan di Jawa Barat dapat meningkat secara bertahap dan merata.

Formulasi kebijakan Program Sekolah Maung (Manusia Unggul) dalam penelitian ini menggunakan Multiple Streams Framework (MSF) yang dikembangkan oleh John W. Kingdon. Menurut Kingdon (2014), proses lahirnya suatu kebijakan publik tidak berlangsung secara linear, melainkan dipengaruhi oleh interaksi tiga arus, yaitu problem stream (arus masalah), policy stream (arus kebijakan), dan political stream (arus politik). Ketiga arus tersebut bertemu pada suatu momentum yang tepat yang disebut policy window (jendela kebijakan), yang membuka peluang bagi suatu usulan untuk diadopsi menjadi kebijakan publik. Dalam proses tersebut, hadir policy entrepreneur yang berperan sebagai aktor penghubung ketiga arus dan memanfaatkan peluang agar suatu gagasan dapat masuk ke agenda pemerintah. Kerangka ini banyak digunakan untuk menjelaskan proses agenda setting dan formulasi kebijakan di berbagai sektor karena mampu menggambarkan bagaimana faktor masalah, alternatif solusi, dan dinamika politik saling berinteraksi dalam pengambilan keputusan publik.

Problem Stream (Arus Masalah)

Dalam perspektif Multiple Streams Framework (MSF) oleh Kingdon, suatu isu bergeser menjadi perhatian pengambil keputusan ketika terdapat bukti empiris mengenai kesenjangan sistemik di lapangan. Arus masalah (problem stream) berfokus pada bagaimana sebuah kondisi didefinisikan dan dikenali sebagai masalah publik yang

Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 6, No. 1,31 Agustus 2026, pp. 83-112
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v6i1.940

memerlukan intervensi kebijakan. Pengenalan masalah umumnya dipicu oleh indikator data, peristiwa krusial, atau umpan balik dari implementasi program yang sedang berjalan. Pemerintah atau aktor kebijakan akan mulai bergerak ketika menyadari adanya jarak atau anomali antara kondisi faktual di masyarakat dengan standar ideal yang seharusnya dicapai oleh sebuah sistem makro.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan I-1 selaku Kepala Bidang PKLK Dinas Pendidikan Jawa Barat, arus masalah berakar pada kondisi faktual bahwa infrastruktur dan kualitas pendidikan di Jawa Barat belum merata, yang berisiko menurunkan mutu lulusan apabila tidak segera diintervensi. Masalah ini diperparah oleh pengabaian potensi anak cerdas istimewa, karena penyatuan siswa berkecerdasan di atas rata-rata ke dalam kelas reguler membuat pembelajaran menjadi monoton sehingga kelebihan inteligensia mereka tidak tergali secara optimal. Selain itu, ditemukan asimetri kelembagaan dalam layanan pendidikan khusus, sebab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan khusus semestinya memfasilitasi spektrum siswa di bawah dan di atas rata-rata populasi yang masing-masing berjumlah sekitar 2,5 persen, namun selama ini pemerintah baru memfasilitasi kelompok bawah melalui Sekolah Luar Biasa (SLB), sementara anak cerdas istimewa belum memiliki wadah setara di tingkat sekolah negeri. Temuan ini diperkuat oleh informan I-2 yang menyoroti pentingnya kevalidan data regulasi untuk merespons ketimpangan layanan tersebut.

Sementara itu, dinamika masalah dari sisi masyarakat terdampak menunjukkan realita psikologis dan teknis yang cukup berat di lapangan. Informan I-6 mengungkapkan adanya kesimpangsiuran informasi dan ketidakstabilan sistem yang mengganggu kondisi psikologis orang tua dan anak, akibat miskomunikasi sistemik dari pusat yang menyebabkan informasi dari guru di sekolah asal kerap keliru, seperti kesalahpahaman bahwa kuota sekolah swasta tidak bebas dipilih karena mutlak ditunjuk pemerintah. Masalah ini diperparah oleh perubahan skor pada portal pendaftaran yang berubah-ubah tanpa pemberitahuan resmi, sehingga menciptakan kepanikan yang membuat sejumlah calon pendaftar memilih mundur sebelum proses seleksi berlangsung. Di sisi lain, informan I-5 dari kelompok siswa yang tidak diterima menyoroti ketatnya standarisasi seleksi, karena berbeda dengan pendaftaran reguler yang hanya menyaring dari tingkat bawah, Sekolah Maung menyaring prestasi yang jauh

lebih ketat, minimal tingkat provinsi, nasional, hingga internasional, dan proses ini sempat diwarnai kendala teknis berupa data nilai rapor atau sertifikat yang mendadak hilang atau kosong saat seleksi berlangsung.

Pada dimensi kesiapan sumber daya, penurunan anggaran APBD Jawa Barat dari tahun ke tahun akibat kebijakan efisiensi fiskal memaksa pemerintah daerah mengambil solusi optimal dengan tidak membangun gedung baru, melainkan mengoptimalkan 40 sekolah negeri eksisting yang terdiri dari 28 SMA Negeri dan 12 SMK Negeri. Keputusan ini memunculkan tantangan turunan berupa beratnya tugas pemerintah dalam menyiapkan kompetensi dan mentalitas guru internal eksisting agar memiliki keterbukaan untuk dikembangkan dan mampu beradaptasi dengan kurikulum diferensiasi secara cepat. Selain tantangan fiskal dan internal sekolah, penerapan seleksi murni berbasis prestasi tanpa sistem zonasi juga memunculkan ancaman eksklusi sosial, karena penghapusan kuota zonasi menimbulkan rasa ketidakadilan bagi warga sekitar berkemampuan rata-rata yang otomatis tereliminasi oleh sistem, sehingga berpotensi memicu resistensi sosiologis dari masyarakat lokal.

Berdasarkan temuan lapangan dari keenam informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa arus masalah (problem stream) dalam formulasi kebijakan Sekolah Maung terbentuk dari dua sumber yang saling memperkuat, yaitu masalah struktural pada level kebijakan pendidikan daerah, berupa ketimpangan mutu pendidikan antarwilayah dan belum tersedianya layanan khusus bagi peserta didik berkemampuan di atas rata-rata, serta masalah teknis-operasional pada level implementasi awal, berupa ketidakstabilan sistem informasi pendaftaran, simpang siurnya sosialisasi kebijakan, dan persepsi ketidakadilan pembobotan seleksi di kalangan masyarakat yang anaknya tidak diterima. Dengan demikian, arus masalah pada kebijakan ini tidak semata-mata bersumber dari kesenjangan makro-struktural, tetapi juga diperparah oleh lemahnya manajemen teknis di lapangan, sehingga maksud baik dari perumusan kebijakan berpotensi melahirkan beban psikologis dan rasa ketidakadilan sosial apabila tidak diimbangi dengan kestabilan sistem informasi dan sosialisasi yang matang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Zaini (2026) dalam kajian "Analisis Multiple Streams Framework Kebijakan Sekolah Rakyat: Implikasi terhadap Manajemen Pendidikan di Indonesia" yang menekankan bahwa reformasi manajemen pendidikan baru dapat terwujud apabila masalah-masalah sistemik di lapangan, seperti

ketimpangan kualitas, aksesibilitas, dan sarana, berhasil diidentifikasi secara nyata berbasis data empiris. Sejalan dengan itu, Yangambi (2023) menegaskan bahwa perbedaan kualitas sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang memengaruhi mutu pendidikan, sebagaimana tercermin dari keluhan informan mengenai ketimpangan infrastruktur pendidikan di Jawa Barat. Temuan ini juga diperkuat oleh Asriyanti dkk. (2025) yang menegaskan pentingnya manajemen pendidikan inklusif dalam menyusun kebijakan untuk pendidikan yang setara dan berkualitas guna merespons kesenjangan mutu antarwilayah. Ketiga penelitian tersebut, yang seluruhnya dipublikasikan dalam kurun lima tahun terakhir, memperkuat relevansi konsep problem stream Kingdon (2014) bahwa identifikasi masalah berbasis data empiris menjadi prasyarat utama bagi lahirnya kebijakan pendidikan daerah yang responsif dan terarah. Temuan ini juga diperkuat oleh Asriyanti dkk. (2025) yang menegaskan pentingnya manajemen pendidikan inklusif dalam menyusun kebijakan untuk pendidikan yang setara dan berkualitas guna merespons kesenjangan mutu antarwilayah. Penelitian ini juga sama dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari (Teodorovic, 2008) dalam kajiannya yang berjudul "Why Education Policies Fail: Multiple Streams Model of Policymaking", yang menjelaskan bahwa kegagalan atau hambatan besar dalam kebijakan pendidikan sering kali disebabkan oleh ketidakstabilan teknis, miskomunikasi, serta kegagalan dalam memitigasi beban psikologis dan sosiologis para aktor pelaksana di lapangan saat kebijakan diformulasikan. Penelitian-penelitian tersebut memperkuat relevansi konsep problem stream Kingdon (2014) bahwa identifikasi masalah berbasis data empiris serta kesiapan operasional menjadi prasyarat utama bagi lahirnya kebijakan pendidikan daerah yang responsif dan terarah.

Policy Stream (Arus Kebijakan)

Dalam perspektif Multiple Streams Framework (MSF) yang dikembangkan oleh Kingdon, policy stream merupakan arus yang menampung berbagai gagasan, alternatif solusi, dan rancangan kebijakan yang dikembangkan oleh para aktor kebijakan sebagai respons atas permasalahan publik yang telah teridentifikasi. Gagasan-gagasan tersebut berasal dari berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, pakar, organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, maupun kelompok kepentingan yang secara aktif menawarkan solusi terhadap persoalan yang dihadapi. Berbagai alternatif kebijakan tersebut tidak serta-merta diadopsi menjadi kebijakan publik, melainkan terlebih

dahulu melalui proses penyaringan (policy primeval soup), yaitu proses kompetisi antargagasan yang mempertimbangkan kelayakan teknis (technical feasibility), kesesuaian dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat (value acceptability), ketersediaan sumber daya, dukungan politik, serta potensi implementasinya. Hanya alternatif kebijakan yang dinilai realistis, efektif, dan memperoleh dukungan memadai yang akan bertahan dalam policy stream dan memiliki peluang untuk dipilih ketika policy window terbuka (Béland & Howlett, 2016).

Dalam kerangka MSF, policy stream menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya permasalahan yang mendesak, tetapi juga oleh tersedianya solusi yang telah dirumuskan secara matang. Proses ini berlangsung secara dinamis melalui diskusi, kajian ilmiah, evaluasi kebijakan sebelumnya, serta pertukaran gagasan di antara komunitas kebijakan (policy communities), sehingga policy stream menjadi arena intelektual yang menghasilkan berbagai inovasi kebijakan (Goyal, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I-2 selaku Analis Kebijakan Ahli Muda yang terlibat langsung dalam proses pengembangan kebijakan, dari perspektif kelayakan teknis (technical feasibility), Sekolah Maung dirancang dengan landasan konseptual yang cukup matang. Program ini mengadopsi kurikulum pengayaan yang menekankan penguasaan kompetensi global dan ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK), dengan diferensiasi jalur pendidikan antara SMA Maung yang diarahkan melanjutkan ke perguruan tinggi terbaik, dan SMK Maung yang diorientasikan pada kesiapan kerja dan kewirausahaan. Kekuatan utama dalam dimensi teknis ini terletak pada strategi pengembangan sumber daya manusia pendidik, di mana Sekolah Maung membuka kolaborasi dengan praktisi industri serta menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, yang mencerminkan kesadaran bahwa pencapaian kompetensi global membutuhkan sinergi antara institusi pendidikan dengan ekosistem industri dan akademik secara lebih luas.

Dari sisi penerimaan masyarakat (public acceptability), tujuan kebijakan Sekolah Maung untuk mengarahkan siswa masuk ke perguruan tinggi terbaik, mewujudkan pemerataan akses pendidikan, serta membekali peserta didik dengan kompetensi global secara umum sejalan dengan aspirasi publik, menjadi modal sosial penting bagi legitimasi kebijakan. Lebih dari itu, Sekolah Maung juga menanamkan nilai karakter

yang bersumber dari kearifan lokal melalui pendekatan Pancawaluya yang meliputi nilai Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singkur, dengan identitas lulusan yang disebut Manusia Waluya yang mencerminkan keseimbangan Waluya Raga, Waluya Rasa, Waluya Budi, Waluya Hirup, dan Waluya Karsa. Dari aspek efisiensi sumber daya, kebijakan ini mengoptimalkan kolaborasi multipihak melalui keterlibatan praktisi industri dan akademisi perguruan tinggi, yang mencerminkan prinsip efisiensi berbasis kolaborasi dalam proses seleksi alternatif kebijakan.

Meskipun demikian, temuan dari informan I-5 dan I-6 menunjukkan bahwa kematangan konsep tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan mekanisme teknis seleksi. Kedua informan menyoroti pembobotan nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebesar 60 persen pada jalur prestasi (Japres) yang dinilai memberatkan siswa angkatan pertama yang baru pertama kali menempuh sistem TKA, sehingga nilai rapor yang dikumpulkan selama tiga tahun menjadi kurang berpengaruh karena hanya dihargai 40 persen, berbeda dengan jalur reguler yang menerapkan pembobotan seimbang 50-50. Selain itu, ditemukan pula ketidakjelasan kriteria penilaian pada jalur kompetensi nonakademik, aturan sertifikat kejuaraan yang hanya mengakui prestasi tingkat nasional sehingga mengesampingkan prestasi tingkat provinsi maupun kabupaten, serta ketidakstabilan sistem kuota dan skor pada portal pendaftaran yang berubah tanpa penjelasan resmi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kematangan gagasan kebijakan pada level konseptual dengan kesiapan instrumen teknis pada level operasional, yang turut memunculkan tantangan berupa potensi ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas, munculnya kembali stigma dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit, kebutuhan harmonisasi dengan mekanisme Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) nasional, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan seleksi.

Program Sekolah Maung telah memenuhi sejumlah kriteria kelayakan alternatif kebijakan dalam policy stream MSF, yakni kelayakan teknis melalui rancangan kurikulum tiga pilar dan kemitraan dengan industri serta perguruan tinggi, penerimaan nilai melalui pendekatan Pancawaluya yang berakar budaya lokal, dan efisiensi sumber daya melalui skema kolaborasi multipihak. Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa kesiapan mekanisme teknis seleksi, khususnya pembobotan TKA dan kejelasan kriteria penilaian jalur nonakademik, belum sepenuhnya matang untuk mengimbangi

kematangan konsep kebijakan pada level makro, sehingga alternatif kebijakan ini masih memerlukan penyempurnaan pada aspek transparansi dan keadilan teknis seleksi sebelum dapat sepenuhnya bertahan dalam proses penyaringan (policy primeval soup).

Temuan ini memperkuat pandangan Komarudin & Shofiyyah (2023) bahwa model pengembangan sekolah unggul tidak cukup ditentukan oleh seleksi input semata, melainkan juga oleh iklim sekolah, budaya belajar, dan sistem pengelolaan yang berkeadilan. Sejalan dengan itu, Maudinah & Musgamy (2026) menegaskan bahwa kebijakan sekolah unggulan berpotensi menimbulkan diskriminasi input siswa apabila mekanisme seleksinya tidak dirancang secara inklusif, sebagaimana tercermin dari keluhan pembobotan TKA dan kriteria sertifikat kejuaraan dalam penelitian ini. Selain itu, prinsip high performance organization dari Waal dkk. (2025) turut relevan, karena keberhasilan sekolah berkinerja tinggi memerlukan sistem penjaminan mutu, keterbukaan, dan orientasi tindakan, bukan hanya kematangan desain kurikulum semata. Ketiga penelitian yang terbit dalam lima tahun terakhir tersebut memperkuat argumen bahwa policy stream Sekolah Maung memerlukan penyempurnaan pada aspek transparansi dan keadilan teknis seleksi agar alternatif kebijakan ini dapat bertahan secara berkelanjutan dalam proses penyaringan kebijakan.

Political Stream (Arus Politik)

Dalam Teori Multiple Streams Framework (MSF) yang dikembangkan oleh Kingdon (2014), political stream (arus politik) merupakan arus yang menggambarkan kondisi dan dinamika politik yang memengaruhi peluang suatu isu untuk masuk ke dalam agenda kebijakan pemerintah. Arus ini mencakup perubahan suasana politik, dukungan atau tekanan dari kelompok kepentingan, perubahan kepemimpinan, hasil pemilihan umum, serta arah kebijakan pemerintah yang dapat mendorong atau menghambat lahirnya suatu kebijakan. Dalam penelitian ini, political stream digunakan untuk menganalisis bagaimana dinamika politik, seperti pergantian kepemimpinan, komitmen politik pemerintah daerah (political will), dukungan birokrasi, pelembagaan kebijakan dalam dokumen perencanaan daerah, serta kondisi sosial masyarakat memberikan legitimasi dan momentum bagi lahirnya Program Sekolah Maung sebagai kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I-1, faktor pertama yang menjadi pendorong lahirnya Program Sekolah Maung adalah pergantian kepemimpinan yang

diikuti dengan munculnya visi politik baru (political will). Setelah Gubernur Jawa Barat yang baru dilantik, pemerintah daerah membawa visi pembangunan "Jabar Istimewa", yang di dalamnya terdapat program prioritas "Pendidikan Istimewa", sehingga komitmen tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam pembentukan Program Sekolah Maung sebagai sekolah unggulan yang bertujuan menciptakan sumber daya manusia berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter kuat. Selain adanya komitmen kepala daerah, dukungan politik juga terlihat dari pelembagaan kebijakan ke dalam dokumen perencanaan daerah, di mana Program Sekolah Maung dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat dan diperkuat melalui Keputusan Gubernur, sehingga memperoleh kepastian pelaksanaan baik dari sisi birokrasi, penganggaran, maupun koordinasi antarperangkat daerah.

Hasil wawancara juga menunjukkan adanya perubahan cara pandang pemerintah dan masyarakat terhadap keadilan dalam pelayanan pendidikan, yang dalam teori MSF dikenal sebagai national mood atau local mood. Selama ini, kebijakan pendidikan di Jawa Barat lebih banyak memberikan perhatian kepada peserta didik yang membutuhkan layanan afirmasi, zonasi, maupun pendidikan khusus melalui SLB, namun muncul kesadaran bahwa peserta didik berkemampuan akademik di atas rata-rata juga memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan potensinya. Selanjutnya, arus politik juga terlihat dari kemampuan pemerintah memanfaatkan best practice yang telah berhasil diterapkan sebelumnya, seperti SMA Taruna Nusantara dan MAN Insan Cendekia, yang menjadi referensi dalam menyusun konsep Sekolah Maung sehingga proses perumusan kebijakan menjadi lebih efektif dan mempercepat kepercayaan para pengambil keputusan. Di sisi lain, pemerintah daerah turut mempertimbangkan potensi penolakan masyarakat akibat sistem seleksi berbasis prestasi tanpa jalur zonasi maupun afirmasi, sehingga mengambil langkah kompromi dengan melibatkan sekolah-sekolah swasta di sekitar lokasi sebagai sekolah pendamping bagi peserta didik yang tidak diterima.

Namun demikian, dukungan politik yang kuat dari sisi pemerintah tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penerimaan politik dari masyarakat akar rumput. Informan I-5 memandang bahwa Program Sekolah Maung memunculkan kesan terbentuknya kelompok elite baru bagi peserta didik yang diterima, dibandingkan dengan siswa yang harus melanjutkan ke sekolah reguler maupun sekolah swasta

pendamping yang kurang diminati. Adanya standar ganda dalam penerimaan sertifikat kejuaraan serta perubahan kuota yang berlangsung secara mendadak turut memperkuat kecurigaan sebagian masyarakat bahwa kebijakan ini sarat kepentingan tertentu, sehingga informan berharap pemerintah memperbaiki transparansi sistem data pada portal pendaftaran, menetapkan kebijakan kuota yang konsisten, serta merancang pembobotan nilai dan batas wilayah kejuaraan yang lebih adil bagi seluruh latar belakang peserta didik. Senada dengan itu, informan I-6 menilai perubahan kuota sekolah yang berlangsung tiba-tiba sebagai indikasi adanya penyesuaian regulasi di tingkat atas yang perlu dibenahi melalui perbaikan sistem portal dan penghapusan syarat sertifikat yang dinilai mendiskriminasi prestasi tingkat kabupaten. Sebaliknya, dari sisi kelompok yang diterima, informan I-3 menyampaikan respons yang positif berupa dukungan dan apresiasi dari lingkungan sekitar atas keberhasilannya lolos seleksi Program Sekolah Maung, yang menggambarkan bahwa penerimaan politik terhadap kebijakan ini bersifat terbelah antara kelompok yang diuntungkan dan kelompok yang merasa dirugikan.

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Damayanti & Niswatin (2023) bahwa sekolah unggul merupakan sekolah yang mampu memberikan layanan pendidikan dengan kualitas lebih baik dibandingkan sekolah pada umumnya, didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten dan sarana yang memadai, meskipun dalam praktiknya konsep sekolah unggul di Indonesia masih lebih banyak menekankan kemampuan akademik dibandingkan pengembangan karakter, kreativitas, dan keterampilan sosial peserta didik secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, arus politik dalam formulasi kebijakan Sekolah Maung terbentuk dari pergantian kepemimpinan daerah yang membawa visi “Jabar Istimewa”, pelembagaan kebijakan ke dalam RPJMD dan Keputusan Gubernur, perubahan cara pandang (mood) masyarakat mengenai keadilan layanan pendidikan bagi siswa berkemampuan di atas rata-rata, serta pemanfaatan best practice sekolah unggulan yang telah teruji. Dapat disimpulkan bahwa meskipun dukungan politik dari sisi pemerintah tergolong kuat dan solid, penerimaan politik dari masyarakat akar rumput masih terbelah, karena sebagian kelompok memandang perubahan kuota yang mendadak serta ketatnya syarat sertifikat sebagai indikasi adanya kepentingan tertentu yang mengiringi kebijakan ini, sehingga memunculkan kesan eksklusivitas dalam layanan

pendidikan yang berpotensi melemahkan legitimasi sosial kebijakan apabila tidak dikelola secara komunikatif.

Temuan ini sejalan dengan Zaini (2026) yang menunjukkan bahwa komitmen politik pemerintah menjadi faktor penentu utama terbukanya jendela kebijakan pendidikan, namun keberhasilan tersebut tetap perlu diimbangi dengan legitimasi publik agar kebijakan dapat diterima secara luas oleh masyarakat sasaran. Selanjutnya, Aisyahrani (2024) menegaskan bahwa keberhasilan sekolah dalam menanamkan nilai dan membangun kepercayaan turut ditentukan oleh keterlibatan orang tua dan masyarakat secara berkelanjutan, sehingga persepsi ketidakadilan yang muncul dari kelompok orang tua yang tidak diterima berpotensi melemahkan dukungan sosial terhadap kebijakan ini apabila tidak diimbangi dengan komunikasi publik yang memadai. Di samping itu, Pasaribu dkk. (2026) turut memperkuat pentingnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari basis dukungan struktural kebijakan sekolah unggul, yang dalam konteks political stream berperan menopang legitimasi teknokratis kebijakan Sekolah Maung di mata birokrasi maupun publik. Ketiga penelitian tersebut, yang seluruhnya terbit dalam rentang lima tahun terakhir, memperkuat argumen bahwa keberlanjutan dukungan politik terhadap Sekolah Maung memerlukan pengelolaan aspek penerimaan publik secara setara dengan pengelolaan aspek regulasi dan kelembagaan.

Policy Window (Jendela Kebijakan)

Menurut Kingdon, terdapat tiga aliran dalam tahapan agenda setting, yaitu problem stream, policy stream, dan political stream. Melalui aliran tersebut, setiap isu diidentifikasi lalu diseleksi oleh pemerintah, dan ketika ketiga aliran tersebut bertemu secara bersamaan, maka akan terbuka policy window, yaitu kesempatan untuk mendorong solusi alternatif terhadap masalah kebijakan dan mengubahnya menjadi kebijakan nyata. Pembukaan kesempatan ini terjadi karena bertemunya berbagai masalah, kebijakan, dan dinamika politik, yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku kebijakan untuk mendorong kebijakan alternatif (Iswahyudi, 2020). Dalam konteks ini, kerangka Multiple Streams digunakan untuk memahami proses pembentukan kebijakan Program Sekolah Maung di Provinsi Jawa Barat, di mana ketiga aliran dapat diikuti secara konkret mulai dari tahap identifikasi masalah hingga tersedianya alternatif solusi.

Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung
Vol. 6, No. 1,31 Agustus 2026, pp. 83-112
E-ISSN: 2775-6262, P-ISSN: 2775-541X, DOI: 10.52496/identitas.v6i1.940

Kebijakan Sekolah Maung terbentuk melalui momentum policy window yang tercipta dari bertemunya tiga aliran utama. Aliran masalah (problem stream) bersumber dari keresahan bahwa sistem pendidikan reguler selama ini menyamaratakan seluruh peserta didik sehingga anak-anak berkemampuan intelektual di atas rata-rata tidak dapat menggali potensinya secara optimal, sementara perlakuan khusus baru diberikan kepada anak-anak di bawah rata-rata melalui SLB. Di sisi lain, aliran kebijakan (policy stream) sudah relatif matang karena mengadopsi berbagai praktik terbaik (best practice) dari sekolah unggul terdahulu seperti SMA Taruna Nusantara, MAN Insan Cendekia, Sekolah Garuda, hingga sekolah swasta internasional, sehingga formulasi kebijakan tidak perlu dimulai dari nol, melainkan cukup memodifikasi kurikulum nasional dengan kurikulum pengayaan internasional (Cambridge) dan kearifan lokal Gapura Pancawaluya. Momentum krusial yang membuka jendela kebijakan ini dipicu oleh aliran politik (political stream), yaitu pelantikan Gubernur baru pada tahun 2025 yang membawa visi "Jabar Istimewa", yang kemudian diintegrasikan ke dalam RPJMD dan dikonversi menjadi keputusan administratif yang sah dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur. Pertemuan ketiga arus inilah yang menjelaskan mengapa formulasi kebijakan Sekolah Maung dapat dieksekusi dengan sangat cepat, yaitu kurang dari satu tahun, untuk diimplementasikan pada tahun 2026.

Meskipun policy window dalam formulasi Kebijakan Sekolah Maung berhasil dimanfaatkan sehingga kebijakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan dalam waktu yang relatif cepat, kondisi tersebut tetap menghadirkan sejumlah tantangan dalam tahap implementasinya. Tantangan tersebut muncul dari aspek legitimasi publik, terutama terkait kekhawatiran masyarakat terhadap potensi ketimpangan antara sekolah unggulan dan sekolah reguler sebagaimana telah diuraikan pada dimensi political stream. Sementara itu, dari sisi dampak, terbukanya policy window memberikan keuntungan berupa percepatan pengambilan keputusan, efisiensi dalam adopsi kebijakan karena tidak perlu merancang model dari awal, serta kuatnya dukungan politik dari pemerintah daerah yang memperlancar proses legalisasi dan implementasi kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa terbukanya policy window Kebijakan Sekolah Maung terjadi ketika permasalahan peningkatan kualitas pendidikan dan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia bertemu dengan alternatif kebijakan berupa

pendirian Sekolah Maung serta dukungan politik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertemuan ketiga arus tersebut menciptakan momentum yang memungkinkan kebijakan dirumuskan dan diadopsi secara cepat, namun kecepatan formulasi ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sejumlah instrumen teknis, seperti sistem informasi pendaftaran dan mekanisme sosialisasi, belum sepenuhnya matang pada tahap awal implementasi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Zaini (2026) mengenai Analisis Multiple Streams Framework Kebijakan Sekolah Rakyat, yang menunjukkan bahwa policy window terbuka ketika isu kemiskinan dan putus sekolah memperoleh perhatian pemerintah, tersedia alternatif kebijakan Sekolah Rakyat, serta didukung oleh komitmen politik pemerintah pusat, meskipun konteks kedua penelitian berbeda karena penelitian ini membahas sekolah unggulan di tingkat provinsi, sedangkan penelitian tersebut mengkaji kebijakan pendidikan nasional. Kecepatan formulasi kebijakan dalam penelitian ini juga sejalan dengan prinsip Waal dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa adopsi kerangka high performance organization dari lembaga yang telah terbukti berhasil dapat mempercepat proses transformasi organisasi pendidikan tanpa harus merancang model dari awal. Selain itu, Komarudin & Shofiyyah (2023) turut menegaskan bahwa replikasi model pengembangan sekolah unggul yang telah teruji dapat mempercepat proses perumusan kebijakan, namun tetap memerlukan penyesuaian terhadap iklim dan budaya sekolah setempat agar implementasinya berjalan efektif. Ketiga penelitian yang terbit dalam lima tahun terakhir ini memperkuat pemahaman bahwa kecepatan pemanfaatan policy window perlu diimbangi dengan kesiapan instrumen teknis implementasi agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara optimal.

Policy Entrepreneur (Aktor Penggerak Kebijakan)

Sekolah Maung (Manusia Unggul) merupakan program transformasi pendidikan unggulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, dengan mengubah sekolah-sekolah berprestasi yang sudah ada menjadi pusat pengembangan talenta dengan kurikulum khusus yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan spesifik siswa. Dalam perspektif Multiple Streams Framework, policy entrepreneur merupakan aktor yang berperan aktif mendorong suatu gagasan agar dapat diterima dan diadopsi menjadi kebijakan publik. Informan I-1 menjelaskan bahwa

penyusunan kebijakan diawali dengan identifikasi kebutuhan layanan pendidikan bagi peserta didik berkemampuan di atas rata-rata, dilanjutkan dengan penelaahan terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, regulasi pendidikan, hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang kemudian menjadi dasar dalam merumuskan desain kebijakan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Selain berperan dalam penyusunan konsep, aktor penggerak kebijakan juga menunjukkan kemampuan menyesuaikan alternatif kebijakan dengan kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah. Keterbatasan anggaran akibat defisit APBD tidak menjadi hambatan untuk menghentikan gagasan pembentukan Sekolah Maung, melainkan mendorong munculnya solusi yang lebih adaptif, yaitu mengoptimalkan sekolah negeri yang telah memiliki potensi dan kesiapan sebagai penyelenggara program. Proses identifikasi terhadap akreditasi sekolah, kesiapan sarana prasarana, kualitas guru, dan dukungan lingkungan sekitar menunjukkan adanya upaya strategis untuk memastikan kebijakan tetap dapat diwujudkan secara efektif, yang mencerminkan karakteristik policy entrepreneur yang tidak hanya mengusulkan ide, tetapi juga mampu membangun argumentasi, memobilisasi sumber daya yang tersedia, dan memanfaatkan momentum agar kebijakan dapat diimplementasikan.

Namun demikian, temuan dari informan I-5 dan I-6 menunjukkan bahwa peran policy entrepreneur pada level pusat belum sepenuhnya diimbangi dengan efektivitas sosialisasi hingga ke tingkat sekolah asal siswa. Kedua informan menyampaikan bahwa ketika mengalami kesulitan mencari informasi atau kendala saat pendaftaran, tidak tersedia pihak pendamping yang secara aktif membantu proses tersebut, sehingga peserta didik merasa harus meraba-raba secara mandiri, bahkan pihak sekolah asal turut mengalami kesalahpahaman akibat sosialisasi kebijakan yang dinilai tidak searah dan berubah-ubah. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa regulasi persyaratan sertifikat kejuaraan minimal tingkat nasional lebih menguntungkan sekolah-sekolah besar di perkotaan yang memiliki anggaran memadai untuk mengirimkan siswanya bertanding ke luar daerah, sementara siswa berprestasi tingkat kabupaten atau provinsi merasa kurang diapresiasi. Selain itu, perubahan kuota penerimaan yang berlangsung secara mendadak turut memunculkan persepsi di kalangan sebagian informan mengenai adanya penyesuaian kebijakan yang kurang transparan pada level pelaksana, sehingga menegaskan pentingnya penguatan kapasitas komunikasi kebijakan pada level birokrasi

pelaksana, khususnya kepada sekolah asal peserta didik.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa policy entrepreneur dalam formulasi Kebijakan Sekolah Maung, yang diperankan oleh pimpinan daerah bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, berhasil menginisiasi gagasan, membangun dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, serta memanfaatkan momentum politik untuk mendorong kebijakan masuk ke agenda pemerintah. Namun demikian, efektivitas peran tersebut belum merata hingga ke level implementasi teknis di lapangan, khususnya dalam hal sosialisasi kebijakan kepada sekolah asal dan pendampingan bagi peserta didik selama proses pendaftaran, sehingga peran policy entrepreneur pada tahap formulasi perlu diperkuat dengan peran fasilitasi yang setara pada tahap sosialisasi dan implementasi awal kebijakan.

Temuan ini sejalan dengan Zaini (2026) yang menunjukkan bahwa aktor pemerintah berperan sebagai policy entrepreneur dalam mengoordinasikan proses perumusan kebijakan dan memanfaatkan dukungan politik sehingga kebijakan dapat diadopsi, meskipun pada Kebijakan Sekolah Rakyat peran tersebut lebih didominasi oleh pemerintah pusat, sedangkan pada Kebijakan Sekolah Maung peran itu berada pada aktor di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangannya dalam bidang pendidikan. Sejalan dengan itu, Aisyahrani (2024) menegaskan bahwa keberhasilan penanaman nilai dan kebijakan pendidikan memerlukan proses yang berkelanjutan serta melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat secara aktif, sehingga kelemahan sosialisasi kepada sekolah asal dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran policy entrepreneur belum sepenuhnya menjangkau seluruh pemangku kepentingan di tingkat akar rumput. Selain itu, Maudinah & Musgamy (2026) turut mengingatkan bahwa kebijakan sekolah unggulan berisiko menimbulkan persepsi diskriminatif apabila tidak dikelola dengan komunikasi kebijakan yang inklusif, sebagaimana tercermin dari persepsi sebagian informan mengenai regulasi sertifikat kejuaraan yang dinilai kurang berimbang. Ketiga penelitian yang terbit dalam lima tahun terakhir ini memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan peran policy entrepreneur tidak hanya diukur dari kemampuan mendorong kebijakan masuk ke agenda pemerintah, tetapi juga dari kemampuan menjembatani kebijakan tersebut hingga ke level pelaksana teknis dan masyarakat sasaran.

Dampak Positif Program Sekolah Maung terhadap Mutu Pendidikan

Program Sekolah Maung merupakan salah satu inovasi kebijakan pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertujuan membentuk sumber daya manusia unggul melalui penyelenggaraan sekolah dengan standar mutu yang lebih tinggi dibandingkan sekolah reguler. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap tantangan pembangunan sumber daya manusia pada era globalisasi, revolusi industri 4.0, dan transformasi digital yang menuntut lulusan tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, literasi digital, kepemimpinan, serta karakter yang kuat.

Dalam perspektif administrasi publik, Program Sekolah Maung dapat dikategorikan sebagai bentuk inovasi pelayanan publik di bidang pendidikan yang berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui penyediaan sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Salah satu dampak positif yang teridentifikasi adalah peningkatan mutu input pendidikan, karena mekanisme seleksi berbasis prestasi memungkinkan sekolah memperoleh peserta didik dengan kemampuan akademik maupun nonakademik di atas rata-rata, sehingga guru dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih kompleks dan menantang. Menurut Mulyasa (2017), kualitas guru merupakan faktor utama yang menentukan mutu pendidikan karena guru memiliki peran strategis sebagai fasilitator, motivator, sekaligus agen perubahan dalam proses pembelajaran, sehingga perpaduan antara peserta didik berkualitas dan tenaga pendidik profesional menjadi fondasi penting bagi peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Selain meningkatkan kualitas input, Program Sekolah Maung juga berpotensi meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui pendekatan yang berpusat pada peserta didik (student centered learning), di mana siswa didorong berperan aktif dalam mencari informasi, berdiskusi, melakukan penelitian sederhana, dan menghasilkan karya inovatif, sehingga mendukung pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS). Pemanfaatan teknologi digital, seperti platform pembelajaran digital, laboratorium virtual, dan kecerdasan buatan, turut menjadi karakteristik utama program ini. Menurut UNESCO (2021), integrasi teknologi dalam pembelajaran merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digital, sehingga implementasi pembelajaran berbasis teknologi di Sekolah Maung berpotensi menghasilkan proses belajar yang lebih efektif dibandingkan

pembelajaran konvensional.

Dampak positif lainnya adalah penguatan pendidikan karakter peserta didik melalui integrasi nilai disiplin, tanggung jawab, integritas, kepemimpinan, kerja sama, dan kepedulian sosial ke dalam kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler. Thomas Lickona (2013) menjelaskan bahwa pendidikan karakter bertujuan membentuk keseimbangan antara moral knowing, moral feeling, dan moral action, sehingga keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai akademik, tetapi juga dari perilaku dan karakter peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat. Program ini juga diperkirakan mampu membangun budaya akademik sekolah yang lebih kuat, karena kehadiran peserta didik berkemampuan tinggi dan guru yang kompeten akan menciptakan iklim belajar yang kompetitif namun tetap sehat. Menurut Deal dan Peterson (2016), budaya sekolah yang positif merupakan salah satu karakteristik utama sekolah berkinerja tinggi karena mampu menciptakan motivasi belajar, semangat berprestasi, dan komitmen seluruh warga sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Keberhasilan dalam meningkatkan kualitas input, proses pembelajaran, dan budaya akademik pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan prestasi akademik maupun nonakademik peserta didik. Dalam teori motivasi prestasi yang dikemukakan oleh McClelland (1987), individu yang berada dalam lingkungan kompetitif cenderung memiliki kebutuhan berprestasi (need for achievement) yang lebih tinggi dibandingkan individu dalam lingkungan yang kurang menantang, sehingga peserta didik di Sekolah Maung memiliki peluang lebih besar memperoleh prestasi unggul baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Lebih jauh lagi, Program Sekolah Maung berpotensi menjadi pusat inovasi pendidikan (center of excellence) yang berfungsi sebagai laboratorium kebijakan (policy laboratory) bagi pemerintah untuk mengembangkan dan menguji berbagai inovasi pembelajaran sebelum direplikasi secara lebih luas ke sekolah-sekolah lain di Provinsi Jawa Barat.

Potensi Kesenjangan antara Sekolah Unggulan dan Sekolah Reguler

Meskipun Program Sekolah Maung diproyeksikan membawa dampak positif, implementasinya memicu sejumlah tantangan mendasar yang berkaitan dengan keadilan distributif dalam sistem pendidikan. Salah satu persoalan utama adalah potensi lahirnya dualisme kelembagaan, di mana institusi unggulan yang dipasok fasilitas

mutakhir, pendidik kompeten, dan siswa berprestasi beroperasi secara kontras di samping sekolah reguler yang serba terbatas. Dikotomi ini berisiko memperkuat persepsi publik bahwa pendidikan bermutu tinggi hanya bersifat eksklusif bagi segelintir sekolah, yang dalam jangka panjang dapat mendegradasi komitmen terhadap pemenuhan hak pendidikan yang setara. Polarisasi tersebut semakin dipertegas oleh gejala teacher concentration, yakni terkonsentrasinya para pendidik berkinerja superior pada klaster Sekolah Maung, yang dikhawatirkan membuat sekolah reguler kehilangan figur pengajar terbaik sehingga memperlebar disparitas kualitas pedagogis antarsekolah.

Disparitas ini juga tercermin dari ketimpangan alokasi sarana dan prasarana penunjang akademik, di mana Sekolah Maung mendapatkan fasilitasi prioritas berupa laboratorium digital, ruang kelas berbasis teknologi modern, dan kompleks asrama, sementara sebagian besar sekolah reguler masih bergelut dengan keterbatasan infrastruktur fisik yang mendasar. Sesuai kajian OECD, ketidakseimbangan akses terhadap fasilitas instruksional merupakan salah satu faktor utama penentu ketimpangan capaian belajar siswa antarlembaga. Selain itu, sentralisasi siswa-siswa terbaik ke dalam satu ekosistem khusus memicu fenomena brain drain domestik, karena sekolah reguler yang ditinggalkan siswa berpotensi tinggi cenderung mengalami penurunan iklim akademis secara kolektif akibat kehilangan agensi lokal yang seharusnya menjadi penggerak budaya belajar teman sejawatnya.

Pada aspek keadilan sosial, model seleksi murni berbasis capaian prestasi juga menyimpan kerentanan terhadap bias kelas sosial, karena peserta didik dari latar belakang ekonomi mapan secara inheren memiliki keunggulan kompetitif melalui dukungan modal finansial untuk mengakses bimbingan belajar tambahan, pelatihan olimpiade, serta fasilitas teknologi penunjang. Tanpa adanya instrumen afirmasi yang dirancang secara cermat, sistem kompetisi ini berisiko melanggengkan hak istimewa kelompok masyarakat tertentu dan memicu pelabelan sosial berupa dikotomi antara “sekolah elite” dan “sekolah biasa”, yang tidak hanya merugikan citra kelembagaan, tetapi juga meruntuhkan motivasi mengajar guru serta gairah belajar siswa di sekolah reguler. Mengacu pada prinsip equity in education, kualitas sistem pendidikan tidak sekadar diukur dari seberapa tinggi capaian kelompok elite akademik, melainkan dari sejauh mana sistem tersebut mampu memperkecil jurang pemisah antarsiswa, sehingga

akselerasi Sekolah Maung yang berjalan tanpa strategi mitigasi dan diseminasi praktik baik ke sekolah reguler di sekitarnya berpotensi berbenturan dengan nilai dasar keadilan pendidikan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Program Sekolah Maung (Manusia Unggul) sebagai strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan pendidikan terbentuk melalui pertemuan tiga arus dalam teori *Multiple Streams Framework*, yaitu *problem stream, policy stream,* dan *political stream*, yang membuka *policy window* dengan dukungan *policy entrepreneur* dari pemerintah daerah. Pada dimensi problem stream, kebijakan ini lahir dari ketimpangan mutu pendidikan antarwilayah serta belum tersedianya layanan khusus bagi siswa berkemampuan unggul di sekolah negeri, yang diperparah oleh kelemahan manajemen teknis pada tahap awal implementasi. Pada dimensi *policy stream*, Program Sekolah Maung dinilai memiliki konsep yang cukup matang karena mengadopsi praktik baik dari SMA Taruna Nusantara dan MAN Insan Cendekia serta menggabungkan kurikulum nasional, internasional, dan kearifan lokal, namun kesiapan instrumen teknis seleksinya masih memerlukan penyempurnaan.

Pada dimensi political stream, dukungan politik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui visi "Jabar Istimewa" memperkuat proses perumusan kebijakan hingga dapat diadopsi dengan cepat, meskipun penerimaan publik di tingkat akar rumput masih terbelah antara kelompok yang diuntungkan dan kelompok yang merasa dirugikan oleh mekanisme seleksi. Pertemuan ketiga arus tersebut membuka *policy window* yang dimanfaatkan secara efektif oleh *policy entrepreneur* di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, meskipun peran tersebut belum sepenuhnya menjangkau level sosialisasi teknis kepada sekolah asal dan peserta didik.

Program ini berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran yang lebih inovatif, penguatan karakter, dan penciptaan sekolah unggulan yang berfungsi sebagai pusat inovasi pendidikan. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan implementasi, seperti sistem informasi pendaftaran yang belum stabil, akses yang belum merata, serta risiko meningkatnya kesenjangan antara sekolah unggulan dan sekolah reguler. Oleh karena itu, keberhasilan Program Sekolah Maung sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga pemerataan akses, transparansi seleksi, dan

keberlanjutan dampak positif bagi seluruh sekolah di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat transparansi sistem informasi pendaftaran, menstandardisasi sosialisasi kebijakan hingga ke tingkat sekolah asal, serta mengevaluasi kembali pembobotan komponen seleksi agar lebih berkeadilan. Upaya mendorong kebijakan agar menjadi lebih inklusif dapat diawali dengan melembagakan sistem pengimbasan *(spillover effect*) guna mereduksi potensi eksklusivitas program sekaligus mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan secara jangka panjang. Dalam skema ini, Dinas Pendidikan Jawa Barat perlu menerbitkan regulasi turunan yang memosisikan 40 Sekolah Maung sebagai pusat percontohan *(center of excellence),* sehingga penerapan kurikulum pengayaan, penguatan budaya mutu, serta metode pembelajaran diferensiasi wajib ditularkan secara berkala ke sekolah-sekolah reguler di sekitarnya. Langkah teknis tersebut perlu didukung oleh penguatan harmonisasi hukum lintas sektor guna membentengi program dari risiko disorientasi akibat transisi kepemimpinan politik daerah, sehingga operasionalisasi Program Sekolah Maung wajib berpijak secara patuh pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2025 tentang Peningkatan Aksesibilitas Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Penyelarasan kedua regulasi tersebut menjadi sangat krusial agar jaminan alokasi anggaran daerah serta pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat terdampak yang diakomodasi melalui sekolah swasta pendamping memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat.

Selain kepastian regulasi, aspek peningkatan kapasitas tenaga pendidik juga perlu distandardisasi secara sistemik melalui kemitraan jangka panjang bersama Dewan Pakar dari berbagai perguruan tinggi yang telah dilibatkan sejak awal perumusan kebijakan. Program pelatihan bagi guru-guru internal Sekolah Maung ini harus diintegrasikan ke dalam agenda kerja tahunan dinas secara konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar sebagai agenda temporer, guna menjaga mutu, efektivitas, serta akuntabilitas pelaksanaan model pembelajaran diferensiasi di dalam kelas secara berkesinambungan. Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat perlu melembagakan mekanisme pengimbasan praktik baik dari Sekolah Maung kepada sekolah reguler secara berkelanjutan, sejalan dengan temuan pada dimensi *problem*

stream, policy stream, dan policy entrepreneur dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji tahap implementasi dan evaluasi dampak Program Sekolah Maung secara lebih mendalam, termasuk dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur capaian mutu pendidikan secara terukur.

Daftar Rujukan

Aisyahrani, A. (2024). Pengembangan Pendidikan Karakter di Sekolah untuk Membentuk Generasi Muda yang Unggul. Vol. 1 No, 1–12.

Asriyanti, M. A., Muhlisin, I., Sari, T. P., Silvi, Y., & Sukatin. (2025). Manajemen Pendidikan Yang Inklusif: Menyusun Kebijakan Untuk Pendidikan Yang Setara Dan Berkualitas. Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS), 3(1), 99–106.

Béland, D., & Howlett, M. (2016). The Role and Impact of the Multiple-Streams Approach in Comparative Policy Analysis. Journal of Comparative Policy Analysis, 18(3), 221–227.

Belina, D., Geleta, A., Beyene, D., & Tafesse, M. (2026). School Quality Enhancement in Secondary Education : Multi-Level School-Based Strategies and Insights That Contribute to Educational Improvement. 02(01), 51–61.

Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Pustaka Pelajar.

Damayanti, E. S., & Niswatin. (2023). Kebijakan Sekolah Unggul dan Akselerasi: Tinjauan Teori Sosial dan Implementasinya. SOSEARCH: Social Science Educational Research, 4(1), 56–65.

Deal, T. E., & Peterson, K. D. (2016). Shaping School Culture: Pitfalls, Paradoxes, and Promises (3rd ed.). Jossey-Bass.

Goyal, A. (2022). Policy Streams and the Politics of Agenda-Setting in Education Reform. International Journal of Public Policy Studies, 9(2), 45–58.

Halean, S., Kandowangko, N., & Goni, S. Y. V. I. (2021). PERANAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI SMA NEGERI 1 TAMPAN AMMA DI TALAUD. Jurnal Holistik, 14(2), 1–15.

Iswahyudi, F. (2020). DKI Jakarta CONTEXTUALIZATION OF MULTI STEAM THEORY : Case Study of the Failure of Area Quarantine Policy Making in DKI Jakarta. 25–42.

Kingdon, J. W. (2014). Agenda, Alternatives, and Public Policies : Second Edition. Pearson.

Komarudin, T. S., & Shofiyyah, N. A. (2023). Model Pengembangan Sekolah Unggul. 3, 3814–3824.

Lickona, T. (2013). Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. Bantam Books.

Maudinah, N. U. R. H., & Musgamy, A. (2026). SEKOLAH UNGGULAN SEBAGAI KEBIJAKAN STRATEGIS : EVALUASI KONSEP , IMPLEMENTASI DAN DAMPAKNYA. 5, 129–142.

McClelland, D. C. (1987). Human Motivation. Cambridge University Press.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.

Mulyasa, E. (2017). Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. PT Remaja Rosdakarya.

Pasaribu, A. G., Sihombing, P., Silitonga, H., Manajemen, M., & Kristen, P. (2026).

Hubungan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidik dengan Sekolah Unggul SMK Negeri 1 Siborong-Borong. 7(1), 31–37.

Prasastisiwi, A. H. (2024). Posisi Indonesia di PISA 2022, Siapkah untuk 2025? https://goodstats.id/article/posisi-indonesia-di-pisa-2022-siapkah-untuk-2025-6RLyK

Pun, R. (2026). Dukungan Mengalir, Sekolah Maung Disiapkan Jadi Terobosan Pendidikan Jabar. Jabarprov.Go.Id. https://jabarprov.go.id/berita/dukungan-mengalir-sekolah-maung-disiapkan-jadi-terobosan-pendidikan-jabar-23917

UNESCO. (2021). Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. UNESCO Publishing.

Waal, A. De, Schreurs, M., Goossens, P., & Dirkx, M. (2025). Building High Performing Schools : A Case Study. 18(2), 77–88. https://doi.org/10.5539/ies.v18n2p77

Yangambi, M. (2023). Impact of School Infrastructures on Students Learning and Performance: Case of Three Public Schools in a Developing Country. Creative Education, 14(04), 788–809. https://doi.org/10.4236/ce.2023.144052

Zaini, A. (2026). ANALISIS MULTIPLE STREAMS FRAMEWORK KEBIJAKAN SEKOLAH RAKYAT: IMPLIKASI TERHADAP MANAJEMEN PENDIDIKAN DI INDONESIA. 13(2).

Teodorovic, J. (2008). Why education policies fail: Multiple streams model of policymaking. Zbornik Instituta Za Pedagoska Istrazivanja, 40(1), 22–36. https://doi.org/10.2298/ZIPI0801022T